

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Dinamika politik di Timur Tengah selalu dinamis dan berkembang setiap saat sehingga menarik untuk diteliti. Timur Tengah sebagai kawasan yang dikenal kaya raya akan kandungan alamnya, terutama minyak yang merupakan kebutuhan vital bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Dalam perkembangannya, di kawasan Timur Tengah sering terjadi konflik, baik itu konflik antar negara-negara di kawasan Timur Tengah sendiri maupun konflik yang melibatkan negara-negara lain terutama negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat yang notabene negara-negara maju yang kapitalis dan selalu mempunyai kepentingan nasional di balik keterlibatannya di dalam berbagai konflik di kawasan Timur Tengah.

Salah satu konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah adalah peristiwa intervensi AS dengan pasukan koalisinya terhadap Irak. Penyerangan yang dilakukan lima tahun silam ke Irak yang dilakukan AS, selain untuk mencari senjata pemusnah massal yang dituduhkan oleh AS, juga disebut-sebut sebagai operasi pembebasan rakyat Irak dari rezim Saddam Husein yang otoriter dan dianggap dapat mengancam perkembangan demokrasi di Irak. Amerika Serikat ingin melakukan penegakan demokrasi di Irak yang diharapkan akan membawa pengaruh bagi negara-negara di sekitarnya di Timur Tengah. Tetapi, isu penegakkan demokrasi justru menjadi pemicu konflik internal yang melibatkan antar suku bangsa yang ada di Irak maupun

aksi kekerasan yang juga menimpa tentara AS yang dikirim ke Irak. Hanya dalam kurun waktu dua bulan, Irak dapat ditaklukkan akan tetapi setelah diumumkan bahwa perang telah berakhir dan sampai pasca intervensi itu selama hampir lima tahun keadaan di Irak juga tidak menjadi aman, setelah tumbangannya rezim Saddam husein pun banyak terjadi konflik di Irak. Jumlah tentara Amerika yang dikirim ke Irak meningkat selama kurun waktu lima tahun. Peningkatan jumlah tentara AS tidak juga membawa kondisi keamanan di Irak menjadi stabil. Semakin banyak pemerintah Amerika mengirimkan tentara semakin meningkat pula tingkat konflik baik antara suku penduduk setempat maupun kekerasan terhadap tentara AS itu sendiri.

B. Tujuan Penulisan

Lazimnya dalam metode penelitian sosial, setelah identifikasi atau perumusan masalah ditemukan, maka ini berarti bahwa kita telah mendapatkan inti dari tujuan penelitian yang akan dilakukan. Tujuan penelitian dalam penulisan ilmiah berkenaan dengan apa yang hendak kita capai dan memberikan maksud agar kita dan pihak lain yang membaca hasil penelitian dapat mengetahui dengan jelas dan pasti apa tujuan sesungguhnya dari penelitian yang dilakukan.¹

Oleh karena itu, terdapat dua tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yaitu, *pertama*, penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat untuk dapat mencapai gelar kesarjanaan pada Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu

¹

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. *Kedua*, selain itu, tulisan ini juga diarahkan untuk memperoleh gambaran lebih jelas tentang bagaimana kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang bersifat globalism terhadap dinamika konflik di Irak.

C. Latar Belakang Masalah

Sebagai anggota masyarakat internasional Amerika juga melakukan interaksi dengan negara lain, bahkan intensitasnya sangat tinggi pada masa pasca Perang Dunia II. Di dalam menjalankan interaksi tersebut, politik luar negeri adalah kegiatan untuk mempengaruhi sikap negara lain serta untuk menyesuaikan kegiatan-kegiatannya dengan lingkungan internasional.² Sebagai sarana mencapai kepentingan nasional,³ politik luar negeri Amerika mempunyai karakteristik yang digambarkan di bawah ini.

Pada dasarnya Amerika Serikat mempunyai tradisi politik luar negeri yang anti kolonial dan anti imperialisme⁴ karena Amerika sendiri lahir dari perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme Inggris. Dalam perjalanan sejarahnya ia mempunyai beberapa prinsip yang menunjukkan *continuity and change* dari tujuan politik luar negerinya, yaitu :

1. Menjamin kemerdekaan dengan perbatasan yang aman.

² George Modelski, *A Theory of Foreign Policy*, terjemahan Syaifullah Mahyudin (Yogyakarta : Fisipol UGM, 1970), p.3.

³ Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relation Dictionary* (Holt, Rinehart and Winston, Inc, 1969), p.128

⁴ Ernest B. May, *American Imperialism: A Study in National Policy* (New York : Oxford University Press, 1968), p. 10

2. Memperluas perbatasan tersebut untuk kepentingan keamanan navigasi dan perdagangan, wilayah untuk penduduk yang berkembang dan tersebarnya demokrasi.
3. Untuk meningkatkan dan melindungi hak-hak dan kepentingan rakyatnya dalam bidang perdagangan dan penanaman modal di luar negeri, melindungi perdagangan di lautan bebas baik dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang.
4. Untuk memelihara netralitas dan perdamaian dengan menjauhkan diri dari perang-perang Eropa dan Asia sepanjang tidak mengganggu keamanan dan kepentingan Amerika Serikat.
5. Untuk mencegah negara-negara Eropa untuk mengkolonisasi lebih lanjut belahan bumi Barat dan campurtangannya dalam masalah Amerika Serikat khususnya dan Amerika umumnya.
6. Berbuat baik di dunia atas dasar rasa kemanusiaan.

Sejak awal berdirinya Amerika Serikat (1776), para pembuat keputusan luar negeri Amerika Serikat selalu mempertimbangkan keadaan dalam negeri dan lingkungan internasional sebagai landasan bagi sikap dan tindakannya dalam melakukan interaksi-interaksi internasional. Amerika Serikat senantiasa mendengungkan tekadnya untuk menegakkan pelaksanaan demokrasi di seluruh dunia. Tekad tersebut kian dipertegas dengan dikeluarkannya Doktrin Carter (1980) yang berusaha mengkaitkan masalah penegakan hak asasi manusia dalam kebijakan luar negeri AS terhadap negara lain. Amerika Serikat telah dikenal sebagai

menjatuhkan sanksi politik, ekonomi, maupun militer kepada negara-negara yang dianggapnya tidak menghormati hak asasi manusia.

Keinginan itu tidak terlepas dari pengaruh kebijakan luar negeri AS yang bersifat globalism. Maksud dari *globalism in foreign policy* ini adalah apapun dasar tindakan Pemerintah AS, membentuk bagaimana dan bilamana AS menjadi terlibat dalam urusan luar negerinya dengan negara-negara lain. Prinsip pertama terdapat keyakinan bahwa AS memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan visi kebebasan individunya ke seluruh dunia. Prinsip ini dilatarbelakangi pemikiran Woodrow Wilson dan juga telah berakar sejak abad ke-18. Dasar moralitas ini menjadi bagian dari pemikiran politik sejak berdirinya AS. Kebebasan individu adalah suatu moral absolute dan Pemerintah AS menjamin kebebasan tersebut. Sementara itu, prinsip kedua pemerintah federal AS mempunyai tugas untuk melindungi warganya dari ancaman eksternal. Hal ini yang nantinya akan menentukan dorongan intervensi AS dalam urusan luar negeri.

Kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang sangat strategis baik dari segi letak maupun sumber daya alamnya melimpah, terutama penghasil minyak dan gas alam terbesar. Karena sebagai kawasan yang strategis, kawasan tersebut tidak pernah lepas dari perhatian negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Timur Tengah mempunyai arti vital dan strategis bagi Amerika Serikat sebagaimana nampak dari pidato mantan Presiden Gerald Ford di San Francisco bulan Oktober

*"American concern for The Middle East is not a matter of choice, it is a matter of vital necessity. It is a strategic part of the world and source of significant and growing portion of our energy resource and those of Western Europe and Japan."*⁵

Perhatian Amerika Serikat terhadap kawasan Timur Tengah mulai meningkat pesat sejak berakhirnya Perang Dunia II. Hal ini seiring dengan menyurutnya kekuatan Inggris sebagai *Major Power*, tidak saja di Timur Tengah tetapi juga ditingkat Internasional pada umumnya. Keterlibatan Amerika Serikat pada kawasan ini mulanya didasari oleh alasan keamanan dan strategis, yaitu keinginan untuk membendung pengaruh Uni Soviet. Namun tiga puluh tahun kemudian, pentingnya minyak di Timur Tengah menjadi faktor penting bagi Amerika Serikat yang menjadi salah satu importir minyak terbesar di dunia. Oleh karena itu kestabilan keamanan di Timur Tengah menjadi penting bagi Amerika Serikat yang harus menjamin kelancaran lalu lintas pengangkutan minyak di wilayah tersebut.⁶

Kepentingan Nasional Amerika Serikat di Timur Tengah pada pokoknya berkisar pada hal-hal sebagai berikut :⁷

1. Mengusahakan tersalurannya sumber-sumber alam yang penting bagi industri dan militer Amerika Serikat dan sekutunya
2. Mengusahakan agar sumber-sumber alam Timur tengah tidak jatuh ketangan musuh

⁵ *Weekly Compilation of Presidential Documents*, November 3, 1973, p.1219 dalam Amien Rais, *Politik dan Pemerintahan Timur Tengah* PAU, Studi Sosial, 1998, hal. 248.

⁶ Smita Notosusanto, "*Krisis Teluk dan Politik Luar Negeri AS Pasca Perang Dingin* , *Global: Politik Internasional*", no.2, 1991, hal. 45

⁷ Sidik Istmiha, *Amerika Serikat Penghambat Damaknas, Membongkar Politik Standar Ganda Amerika*

3. Memelihara kontinuitas mengalirnya keuntungan investasi dan usaha-usaha komersial Amerika Serikat
4. Menjaga kredibilitas dengan jalan memenuhi komitmen Amerika Serikat di Timur Tengah
5. Meneruskan hak transit dan *overflight* bagi pesawat udara dan kapal laut
6. Menjaga eksistensi penguasa-penguasa Timur Tengah yang menjadi sekutu Amerika Serikat
7. Mempertahankan diri dari ancaman komunis (dimasa Perang Dingin) dan kekuatan revolusioner atau fundamentalisme Islam yang dapat membahayakan dominasi dan pengaruh Amerika Serikat dan persekutuan Barat di Kawasan Timur Tengah.

Sejarah hubungan Amerika Serikat dengan Irak pada dasarnya tidak terlalu dekat. Selama hampir dua dekade antara tahun 1967-1984. Kedua negara tidak mempunyai hubungan diplomatik. Hal ini karena Perang Arab-Israel tahun 1967, Amerika mendukung Israel sehingga sejumlah negara Arab termasuk Irak memutuskan hubungan diplomatinya dengan Amerika Serikat. Selain itu sejak Partai Ba'ath berkuasa, Irak lebih cenderung bersekutu dengan Uni Soviet. Hal ini misalnya ditandai dengan disepakatinya "*Treaty of Friendship and Cooperation*" antara kedua negara pada April 1972. oleh karena itu Barat cenderung menilai Irak sebagai satelit Soviet.

Faktor lain yang menyebabkan Irak kurang disukai Barat termasuk Amerika Serikat adalah sikap agresif Irak dan kecenderungannya untuk tampil menjadi *Leader*

dalam konteks regional yang anti imperialis. Kecenderungan Irak untuk menjadi pemimpin regional semakin nyata setelah Saddam Husein menjadi pemimpin Irak tahun 1979. Dalam karir politiknya Saddam Hussein dikenal sebagai tokoh yang ingin mendapatkan pengakuan sebagai "Pemimpin Dunia Arab", julukan yang pernah disandang dua Presiden Mesir, Gamal Abdul Nasser dan Anwar Saddat.

Krisis Irak ditandai dengan tuduhan Amerika Serikat bahwa Irak masih menyimpan senjata kimia dan biologi yang dianggap bisa mengganggu perdamaian dunia. Alasan serangan militer yang berkali-kali diajukan Bush yaitu bahwa Irak adalah pihak potensial menjalin hubungan dengan berbagai organisasi teroris dan memasok senjata pemusnah massal kepada mereka. Menurut Bush, aksi militer ke Irak adalah untuk pelucutan senjata pemusnah massal supaya tidak jatuh ke tangan organisasi teroris.

Tuduhan Amerika Serikat tersebut terdengar aneh mengingat persenjataan Irak sudah dilucuti oleh Amerika Serikat dan sekutunya pasca Perang Teluk tahun 1991 dan bahwa tim pengawas senjata dari PBB masih bertugas di Irak. Tuduhan AS yang baru saja menduduki Afganistan dengan dalih alasan yang berbeda tersebut menunjukkan ketidakpercayaan kepada Irak yang masih dalam status embargo ekonomi dan juga pada kerja tim inspeksi PBB di Irak.

Keberhasilan Amerika mewujudkan keinginannya untuk menyerang Irak pada 20 Maret 2003 dengan mengabaikan legalitas dari Dewan Keamanan PBB serta ketidaksetujuan negara-negara di antaranya negara anggota G-7 seperti Perancis dan Jerman menunjukkan bahwa negara tersebut memang superpower yang belum ada

tandingannya. Lebih lanjut, penyerangan tersebut berakhir dengan “penguasaan” atas wilayah yang diserang sehingga melengkapi atribut dirinya sebagai negara adidaya tunggal dunia.

Dapat dikatakan bahwa krisis Irak sekarang ini merupakan krisis politik yang paling buruk selama PBB berdiri. Dikatakan paling buruk karena, *pertama*, melibatkan secara langsung dalam kancah peperangan negara-negara besar pemegang hak veto yaitu Amerika dan Inggris. *Kedua*, AS dan Inggris menyerang Irak atas kehendaknya sendiri tanpa persetujuan dari Dewan Keamanan PBB.

Sudah hampir lima tahun pasca intervensi Amerika Serikat ke Irak, yang dilancarkan pertama kali pada 20 Maret 2003 silam. Pada kurun waktu lima tahun itu, tampaknya belum ada perubahan yang signifikan yang mengindikasikan bahwa rakyat Irak hidup tentram. Kenyataan yang ada adalah semakin banyak aksi penjarahan, aksi pemboman, dan aksi-aksi kekerasan lainnya yang menunjukkan bahwa negara yang pernah dipimpin oleh Saddam Hussein itu masih terpuruk.

Akibat intervensi Amerika ke Irak yang telah berlangsung selama lima tahun, puluhan ribu warga Irak menjadi korban. Data situs independen bernama Iraqbodycount.org memperkirakan korban sipil yang tewas mencapai 90.000 orang, selain itu, ada sekitar 4.000 tentara AS yang tewas.⁸ Meski pemerintah AS mengklaim meraih kemenangan, hingga kini tentara AS dan tentara koalisi kerap menjadi sasaran serangan roket, bom, dan granat dari kelompok bersenjata

Selain sektor keamanan, sektor ekonomi Irak juga tidak menunjukkan perkembangan positif. Situasi ekonomi masih sangat memprihatinkan, tingkat pengangguran meningkat karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai. Produksi minyak yang menjadi tumpuan harapan rakyat Irak sulit diharapkan karena persoalan minyak justru menjadi sumber konflik internal di antarah Sunni, Syiah dan Kurdi.

Sebelum intervensi Amerika ke Irak, fenomena konflik itu sebenarnya sudah ada. Keanekaragaman suku dan agama menjadi pemicu konflik internal antar masyarakat. Salah satu konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat yaitu suku Kurdi, kaum Syiah dan kaum Sunni. Keototiteran kepemimpinan Saddam Hussein juga mengakibatkan kelompok-kelompok yang bertikai itu menjadi lebih agresif. Suku Kurdi yang pada masa kepemimpinan Saddam Hussein mendapatkan tekanan yang luar biasa ingin mendirikan negara sendiri. Kaum Syiah yang pada masa pemerintahan Saddam Hussein tidak mendapatkan porsi yang besar dalam pemerintahan karena di dominasi oleh Kaum Sunni.

Dinamika konflik di Irak menarik untuk diperhatikan karena pasca lima tahun intervensi justru mengakibatkan peningkatan konflik di Irak. Salah satunya adalah jumlah pasukan militer Amerika Serikat yang banyak menjadi pemicu konflik. Penyerangan terhadap tentara Amerika kerap terjadi pada saat pemerintahan AS mengeluarkan kebijakan untuk mengirimkan tambahan pasukan militer untuk di tugaskan di Irak. Seperti halnya, penegakkan demokrasi yang dilakukan pemerintah AS yang juga mengakibatkan peningkatan konflik. Ditengah tengah kondisi sosial

masyarakat Irak yang porak-poranda akibat intervensi, pemerintah Amerika Serikat menawarkan kehidupan yang demokratis.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan kerangka latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulisan ini mengajukan pertanyaan sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh dari kebijakan politik luar negeri AS yang bersifat globalism terhadap dinamika konflik di Irak?

E. Kerangka Dasar Pemikiran

Setiap penulisan ilmiah, maka senantiasa kita akan menemukan beberapa perspektif yang dapat mendasari penjelasan isi penulisan. Pada bagian berikut, akan dijelaskan beberapa perspektif yang kiranya dapat menjadi kerangka dasar pemikiran dalam penulisan ini, diantaranya adalah *globalism in foreign policy*, demokrasi dan konflik.

1. Globalism in Foreign Policy

A small but powerful group of internationalists is bent on bringing every aspect of our world society under one, universal political system. The philosophy behind this movement is known as globalism.⁹

Sebuah kelompok internasional yang kecil namun sangat kuat memiliki kemampuan untuk membawa setiap aspek kehidupan sosial manusia menjadi satu kesatuan, sistem politik universal. Filosofi dibalik pergerakan ini dikenal dengan globalisme. Jadi, *globalism and foreign policy* adalah suatu keadaan dimana pada akhirnya, kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh suatu negara sebenarnya mengandung dominasi kepentingan dari suatu kelompok tertentu.

Presiden Amerika Serikat (AS) George W. Bush menegaskan “freedom” sebagai “*the core of American values*” dalam mewujudkan perdamaian dunia dan sekaligus mendasari tiap kebijakan politik luar negerinya. Ada dua hal yaitu *pertama*, terdapat keyakinan bahwa AS memiliki tanggung jawab untuk menyebarluaskan visi kebebasan individunya ke seluruh dunia. *Kedua*, adalah tugas pemerintah federal AS untuk melindungi warganya dari ancaman eksternal.

Apapun dasar tindakan Pemerintah AS, kedua prinsip ini membentuk bagaimana dan bilamana AS menjadi terlibat dalam urusan luar negerinya dengan negara-negara lain. Prinsip pertama dilatarbelakangi pemikiran Woodrow Wilson dan juga telah berakar sejak abad ke-18. Dasar moralitas ini menjadi bagian dari pemikiran politik sejak berdirinya AS. Kebebasan individu adalah suatu moral absolute dan Pemerintah AS menjamin kebebasan tersebut. Sementara itu, prinsip kedua akan menentukan dorongan intervensi AS dalam urusan luar negeri.

Pengertian Intervensi mengarah pada hal pemaksaan seperti yang dikemukakan oleh Jack C Plano dan Roy Olton adalah campur tangan secara paksa yang dilakukan oleh satu atau beberapa negara terhadap masalah dalam negeri negara lain dengan

maksud untuk mempengaruhi kebijaksanaan politik dalam atau luar negeri dari negara yang diintervensi.¹⁰

Suatu negara dapat melakukan intervensi terhadap negara lain dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Diminta atau diundang oleh penguasa negara tersebut karena merasa terancam kedudukannya
2. Diundang oleh partai oposisi atau pemberontak untuk menggulingkan pemerintah yang sah
3. Sebagai tamu yang tidak diundang

Suatu negara yang mempunyai potensi yang besar akan terjadinya konflik kesukuan, keagamaan, ekonomi, atau ideologi dalam masyarakat semakin besar kemungkinan bahwa suatu pemerintahan luar akan melakukan intervensi untuk melayani kepentingan-kepentingannya sendiri. Menurut K. J. Holsti, intervensi dikategorikan menjadi lima sebagai berikut :

1. Tindakan Politik Rahasia

Tindakan untuk mempengaruhi kondisi politik negara lain dengan melalui cara-cara yang tersembunyi, yaitu melalui propaganda tersembunyi.

2. Demonstrasi Kekuatan

Memperlihatkan atau mengancam untuk menggunakan kekuatan, baik untuk membantu maupun menghalangi pemberontakan dalam negeri sebuah negara asing.

3. Subversi

Mendukung, mengatur dan mengarahkan suatu potensi pemberontakan di dalam negeri sebuah negara asing.

4. Perang Gerilya

5. Intervensi Militer

Berupa pengiriman sejumlah besar pasukan, baik untuk memantapkan suatu rezim terhadap pemberontakan atau membantu para pemberontak menggulingkan suatu perangkat penguasa yang telah mapan.

Masih menurut K. J. Holsti, tujuan suatu negara untuk melakukan intervensi dibagi menjadi enam macam :

1. Konflik Wilayah Terbatas, dimana terdapat pandangan yang tidak cocok dengan acuan pada kepemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-haki yang dinikmati oleh suatu negara di atau dekat wilayah negara lain
2. Konflik yang berkaitan terutama dengan komposisi pemerintah, tipe konflik ini sering mengandung nada tambahan ideologis yang kuat maksudnya adalah menjatuhkan suatu rezim dan sebagai gantinya mendirikan suatu pemerintahan yang cenderung lebih menguntungkan pihak yang melakukan

Konsepsi *American exceptionalism* dengan messianic ethos-nya telah mendorong intervensi global AS atas nama "*individual liberty*" dan "*freedom*". Henry Kissinger menyebut ini sebagai "*a balance between isolationism and globalism*". Atau Walter Mead (2001) melihatnya sebagai suatu tendensi Wilsonian, Jeffersonian, Jacksonian dan Hamiltonian.

Pemerintah Amerika Serikat mempunyai janji untuk menggulingkan seluruh kekuasaan tirani dan juga berjanji menyebarluaskan kebebasan dan demokrasi hingga ke pelosok tergelap di dunia ini. Karena kebijakan AS adalah untuk terus mencari dan mendukung pertumbuhan gerakan dan institusi demokratis di semua bangsa dan budaya. Ketegasan pemerintah AS menyebutkan kembali janjinya untuk mengakhiri tirani di seluruh dunia dan mengembangkan kebebasan di negara-negara yang mempraktikkan kekerasan dikhawatirkan oleh banyak pihak akan meningkatkan permusuhan dan pertikaian di seantero dunia yang tidak sehaluan dengan konsepsi "*American freedom*" tersebut.

Pemerintah AS tampaknya sangat terinspirasi dengan konsepnya Natan Sharansky dalam *The Case for Democracy : The Power of Freedom to Overcome Tyranny and Terror*. Pemerintahan AS dalam era Presiden Bush saat ini cenderung berkeyakinan bahwa penyebaran kebebasan merupakan bagian yang terpenting dari upaya melindungi AS.

Presiden Bush memiliki keyakinan akan adanya kekuatan transformatif dari kebebasan bertindak. Negara AS juga mempunyai "*free societies*" di Irak dan

Afghanistan tidak jauh dari manifesto kebijakan luar negeri ala Sharansky yang seorang politisi Israel yang ditahan 13 tahun dalam penjara dan dibebaskan tahun 1986.

Konsep ini menekankan kebebasan dan demokrasi adalah masa depan kemanusiaan, dan penyebarluasan kebebasan serta demokrasi adalah satu-satunya jalan untuk menjamin keamanan bagi tiap individu. Politik luar negeri AS ke depan yang merupakan kontinuitas dari kebijakan Bush yang agresif sebelumnya dikhawatirkan banyak negara akan meningkatkan ketegangan dunia. Dimana AS hanya akan menempuh pendekatan multilateral kepada sekutu-sekutunya, namun akan menerapkan cara-cara Amerika terhadap negara negara bukan mitranya dalam menjalankan manifest destiny-nya.

2. Demokrasi dan Konflik

Mochtar Mas'ood dalam bukunya berjudul *Negara Kapital dan demokrasi* (1994:113-122)¹¹ menyinggung perlunya pemahaman konteks internasional guna menjelaskan demokratisasi. Adapun Samuel P. Huntington menyatakan :

“Demokratisasi suatu negeri mungkin dipengaruhi atau barangkali ditentukan oleh tindakan-tindakan pemerintahan dan lembaga-lembaga yang berada di luar negeri.... Jelaslah bahwa pelaku asing boleh jadi juga menggulingkan rejim-rejim demokratis atau mencegah negeri-negeri yang semestinya sudah menjadi demokrasi untuk mewujudkan demokrasi. Aktor luar negeri

¹¹ Mochtar Mas'ood, *Negara Kapital dan Demokrasi* (Jakarta: PT Gramedia, 1994), hal. 113-122.

barangkali dapat dianggap sebagai faktor atau menghalangi pengaruh perkembangan ekonomi dan sosial terhadap demokratisasi.”¹²

Pada umumnya, teori konflik mengarahkan perhatiannya pada kepentingan-kepentingan kelompok dan orang yang saling bertentangan dalam struktur sosial dan pada dimana konflik kepentingan itu saling bertentangan dalam struktur sosial dan pada cara dimana konflik kepentingan itu saling menghasilkan perubahan sosial dengan terus menerus. Apakah angka perubahan itu minimal, ini ada kaitannya dengan kelompok yang lebih kuat dalam memaksakan kemauannya atau memenangkan dukungan dari sebagian besar masyarakat.¹³

Kebencian besar dan yang melekat antar kelompok, antar ras dan antar orang yang berbeda, menyebabkan konflik tidak terelakkan. Kelompok dominan berusaha memelihara dan mempertahankan kedudukannya atau dengan kata lain mempertahankan status quo.¹⁴ Dalam struktur sosial yang terdapat di dalam masyarakat juga terdapat apa yang dinamakan konflik. Dalam dinamika konflik disebutkan bahwa setiap isu tertentu, ada kecenderungan untuk menjadi dua kelompok utama yang tidak dapat dielakkan lagi untuk berkonflik dimana bertentangan sehubungan dengan isu tersebut.

Menurut Dahrendorf sebagaimana dikutip Doyle Paul Johnson,¹⁵ secara umum dalam teori konflik dijelaskan bahwa :

¹² Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, PT. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hal 103-104

¹³ Doyle Paul Johnson (1990) *Teori Sosiologi: Klasik dan Modern*, terjemahan RM Z Luning

1. Setiap masyarakat kapan saja tunduk pada proses perubahan
2. Setiap masyarakat kapan saja memperlihatkan perpecahan dan konflik
3. Setiap elemen dalam suatu masyarakat menyumbang disintegrasi dan perubahan
4. Setiap masyarakat didasarkan pada pemaksaan dari beberapa anggotanya atas orang lain.

Konflik secara konseptual yaitu perwujudan dan atau pelaksanaan beraneka pertentangan antara dua pihak, yang dapat merupakan dua orang atau bahkan golongan besar seperti Negara. Kadang-kadang konflik digunakan untuk menyebutkan pertentangan antara pandangan dan perasaan seseorang (psikologis, percekocan, bentrokan).¹⁶

Menurut Steven L. Spiegel, *Conflict is produced by a crash of culture, a disharmony of interest, a disparity of perception, all of which result mobility of parties to accept separately and together the environment they live in.*¹⁷ “ Konflik ditimbulkan oleh bentrokan kebudayaan, ketidakharmonisan kepentingan, ketidaksamaan persepsi yang semua itu mengakibatkan ketidakmampuan suatu kelompok untuk menerima pemisahan dan kebersamaan dalam lingkungan mereka”.

Konflik itu timbul karena demokrasi, *democracy (bentrokan kebudayaan antara Sunni, Kurdi dan Syiah)*. *Democracy* model baru ini adalah menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan secara penuh, termasuk perbuatan balas

¹⁶ BN. Marbun, S.H, *Kamus Politik*, Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal.341

¹⁷ Steven L. Spiegel and Kenneth N. Walter, *Conflict in World Politics*, Winthrop Publishers Inc

dendam atas nama keluarga atau pribadi, bukan negara.¹⁸ Idealnya, Demokrasi itu mengajarkan bagaimana bersepakat meskipun berbeda pendapat, bagaimana mempertahankan kemajemukan, bagaimana semestinya agama dan kelompok etnis saling menghargai, dan bagaimana semua negara harus menghormati sikap masing-masing.

Demokrasi yang tidak dilandasi dengan kesiapan masing-masing pihak untuk berkompetisi (masyarakat yang masih terbelah (*split community*) rentan bagi lahirnya *democrazy*. Masyarakat Irak yang terbelah membentuk sebuah komunitas yang berbasis kesetiaan kepada suku atau golongannya. Masing-masing kelompok masyarakat itu tentunya mempunyai kepentingan yang berbeda. Mereka siap mempertaruhkan apa saja demi kesetiaan terhadap suatu kelompok tertentu.

Keadaan masyarakat Irak yang masih terbelah ini sangat sulit disatukan karena masing-masing pihak tidak terbiasa dengan keadaan sikap saling menghargai yang mereka kenal adalah saling menjatuhkan lawannya dengan kekerasan. Keadaan yang dimana masing-masing kelompok saling memperebutkan kekuasaan, tidak mau bernegosiasi, tidak mengenal toleransi inilah yang menyebabkan konflik, kerusuhan, pertikaian antar kelompok masyarakat itu.

Demokrasi yang tadinya dianggap sebagai jembatan untuk menyalurkan aspirasi masyarakat malah berubah menjadi *Democrazy* dimana tidak adanya kontrol

¹⁸ <http://64.202.71.11/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/assian1757254.htm>

terhadap perilaku masyarakat itu sendiri. Situasi itu berubah menjadi anarkhi, kekerasan, kerusuhan meningkat seiring dengan proses pemilihan umum yang dilaksanakan sebagai awal dari negara yang demokratis.

F. Hipotesa

Serangkaian latar belakang dan persoalan yang telah dirumuskan serta kerangka dasar pemikiran yang coba ditawarkan pada bagian pembahasan sebelumnya, telah mendorong penulis untuk merumuskan hipotesa, sebagai berikut : Pengaruh dari kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang bersifat Globalism ini akan menyebabkan peningkatan konflik akibat dari :

1. Pemaksaan demokrasi terhadap masyarakat Irak yang masih terbelah
2. Pengiriman jumlah pasukan militer AS yang berlebihan dalam menyelesaikan konflik.

G. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah, akan ditemukan salah satu unsur yang juga dianggap penting dan sebagai syarat bagi sebuah tulisan yang dianggap ilmiah, yaitu teknik pengumpulan data. Karena itu pula, teknik pengumpulan data dalam penulisan karya ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*), yaitu melalui pengumpulan data dari referensi buku. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai literatur atau buku-buku ilmiah, artikel-artikel majalah atau koran, internet, naskah-naskah dan dokumen-dokumen lainnya yang mendukung penulisan. Sumber

data penulisan ini ada data primer dan data sekunder. Sedangkan sumber sekunder adalah bahan yang diperoleh dari orang lain dalam bentuk turunan, salinan atau bukan tangan pertama. Beberapa teknik ini dilakukan karena metode ini lebih mempermudah dan mempersingkat waktu dalam proses penulisan.

H. Jangkauan Penelitian

Penulisan skripsi ini hanya terbatas pada kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat yang bersifat globalism dalam hal pemaksaan demokrasi dan jumlah pasukan militer yang berlebihan. Penelitian ini di batasi pada waktu pertama kali intervensi AS ke Irak pada tahun 2003 sampai empat tahun intervensi yaitu tahun 2007. Kalaupun ada referensi yang diluar itu hanya sebagai faktor pendukung penulisan saja.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini terdiri atas Lima (5) Bab. Masing-masing Bab akan mengemukakan pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan. Pada bab ini, akan memuat beberapa unsur metodologi yang memang harus dipenuhi dalam sebuah karya penulisan ilmiah. Maka pada bagian ini pula akan diuraikan alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kerangka dasar teori, hipotesa, metode penulisan, jangkauan

Bab kedua, merupakan bagian yang menjelaskan mengenai Amerika Serikat dan tujuan Politik Luar Negeri di Timur Tengah, keterlibatan Amerika Serikat di Timur Tengah, dan Arti penting Timur Tengah.

Bab ketiga, merupakan bagian yang menjelaskan permasalahan yang ada di Irak seperti Keotoriteran Kepemimpinan Saddam Hussein, dan dinamika konflik setelah runtuhnya Saddam Hussein.

Bab keempat, merupakan bagian yang menjelaskan peningkatan konflik akibat dari kebijakan politik luar negeri AS yang bersifat *globalism*.

Bab kelima merupakan bagian akhir yang akan memberikan kesimpulan yang didapat dari hasil penulisan yang dilakukan, sekaligus menegaskan kembali apa yang telah dibahas pada bagian-bagian sebelumnya.